

NOTULENSI

Kunjungan Sekretariat OGI di PATTIRO Semarang

Rabu, 23 Agustus 2023 | 10.00 – 12.00 WIB

LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan Peta Jalan Keterbukaan Pemerintah, Sekretariat Nasional OGI yang berada di bawah Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi akan melakukan penjangkaran isu ke masyarakat sipil sampai ke level daerah. Merespon hal tersebut, Sekretariat Nasional OGI akan melakukan audiensi terhadap praktik baik dan pengalaman PATTIRO Semarang dalam mendorong keterbukaan pemerintah sekaligus menelaah isu-isu keterbukaan pemerintah di tingkat regional.

TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya kunjungan ini antara lain untuk:

- 1) Mempelajari praktik baik implementasi nilai-nilai keterbukaan pemerintah di sektor pelayanan publik, pencegahan korupsi, demokrasi, dan keterbukaan informasi publik; dan
- 2) Menggali isu-isu strategis isu kebijakan publik di daerah yang dapat didorong untuk menjadi urgensi isu di peta jalan keterbukaan pemerintah.

PEMBAHASAN

1. Bapak Iskandar Achmad selaku Direktur Eksekutif PATTIRO Semarang menyampaikan pengantar sebagai berikut:

- Pattirol Semarang merupakan NGO yang berdiri pada tahun 2004, hingga saat ini memiliki 20 program yang telah dijalankan dengan kurang lebih 7.230 penerima manfaat yang dibantu oleh 23 donor dan mitra. Membantu dalam 30 kebijakan daerah yang sudah diproduksi terkait kemiskinan, pelayanan publik, dan pendidikan. Selain itu, berkontribusi juga dalam Perpres EITI dan pembentukan UU KIP serta mengawal pembentukan KIP Daerah pertama di Jawa Tengah;
- Wilayah kerja Pattirol Semarang berada di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan jejaring komunitas Pattirol Raya yang terdapat 16 di seluruh Indonesia. Fokus isu Pattirol Semarang meliputi isu kesehatan, pengadaan, pendidikan, kebijakan dan reformasi tata kelola sumber daya publik, dan terakhir mendapatkan dukungan dari STOPTB Partnership untuk advokasi kebijakan dana desa tentang TB. Scope kerjanya berkaitan dengan SDGs Goal 1,2,3,4,5,10,13;
- Program utama di tahun 2023 meliputi monitoring kepatuhan regulasi melalui opentender.net yang diinisiasi oleh ICW untuk mendorong pemerintah kota Semarang dan Pemprov Jawa Tengah membuka proses pengadaan barang dan jasanya. Selain itu program lainnya ialah sahabat pattirol (lewat kaderisasi aktivis NGO, diskusi publik, dan sekolah kepemimpinan muda), serta corruption watch initiative (dengan memonitoring kasus korupsi, kepatuhan terhadap perpres stranas pk, ketiadaan pemantauan terhadap tata kelola BUMD, kesehatan tata kelola SDA & pemilu);

- Kerja sama Pattiro Semarang juga dilakukan dengan inspektorat pemprov dan sudah ada perjanjian kerja sama teknis antara ICW, Pattiro, dan Pemprov untuk inspektorat. Akan tetapi, ada sedikit resistensi di bagian PBJ;
- Pentingnya OGI dalam mendorong pembangunan daerah dilakukan agar akses sumber daya yang tidak bisa diraih Pemprov ataupun Pemda bisa diraih dengan ko-kreasi;
- Rekomendasi pattiro untuk keberlanjutan OGI di daerah adalah dengan menerapkan strategi agar kepala daerah mendapatkan lingkungan kondusif dan positif sehingga saat pengambilan langkah-langkah kebijakan dapat tepat guna dan bermanfaat. Selain itu funding dari OGP kepada OGP Local juga baik untuk dilakukan untuk keberlanjutan yang berkaitan dengan sumber pendanaan dan peningkatan kapasitas SDM;
- Usulan kota/kabupaten untuk dapat bergabung ke dalam OGP Local antara lain Kota Magelang dan Brebes, sementara kota dengan birokrasi yang cenderung terbuka antara lain Semarang dan Solo

2. Shofi Khamidati selaku Perencana Ahli Pertama Direktorat ANTB Bappenas memaparkan pengantar sebagai berikut:

- OGP adalah inisiatif multilateral yang didirikan oleh Indonesia dan 7 negara lainnya dan hingga saat ini 76 negara dan 106 pemerintah daerah telah tergabung sebagai anggota. Di tingkat nasional, Open Government Indonesia (OGI) dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam menjalankan praktik keterbukaan pemerintah dan keanggotaannya dalam OGP. OGI memiliki dasar hukum Keppres No. 13 Tahun 2014 dan Kepmen No. 88 Tahun 2018;
- Saat ini terdapat 7 Rencana Aksi Nasional (RAN) yang dijalankan oleh mitra Sekretariat OGI baik dari K/L maupun OMS. RAN OGI terakhir ialah RAN OGI VII yang memiliki 6 isu strategis mulai dari anti-korupsi dan anggaran (2 komitmen), ruang kewargaan dan demokrasi (4 komitmen), pelayanan publik yang inklusif (3 komitmen), akses keadilan (4 komitmen), GEDSI (1 komitmen), dan energi, lingkungan, dan sumber daya alam (1 komitmen);
- Pada tahun 2023 ini OGI akan melakukan penyusunan Rperpres serta roadmap keterbukaan pemerintah yang akan menjangkau isu strategis baik di skala nasional maupun level daerah;
- Best practices yang dihasilkan dari keberjalanan ko-kreasi K/L dan OMS melalui platform OGI antara lain SP4N-LAPOR, electronic procurement melalui opentender, dan keterbukaan data pemilu melalui opendata.kpu.go.id

3. Sesi tanya jawab menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Untuk pelibatan daerah OGP Local yang lebih luas lagi, indeks-indeks seperti Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks SAKIP, Indeks anti-korupsi, dan lain sebagainya.
- Analisis politik juga diperlukan dalam menjalin keberlanjutan OGP Local, seperti mitra lokal yang memiliki hubungan baik dengan birokrat juga politisi, organisasi yang memiliki kedalaman fokus isu, adanya jaminan legal pelaksanaan aksi atau menjadi bagian dari dokumen teknokratik, karakter individu dan kepala daerah yang inovatif.

- Se jauh ini dari data LKPP belum ada inspektorat Pemprov Jateng maupun Pemkot Semarang tergabung dalam sistem e-pengaduan PBJ, Pattiro Semarang akan berkomunikasi lebih lanjut untuk mengadvokasi integrasi inspektorat tersebut.

DOKUMENTASI

